

Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE.,M.Si

---

MONOGRAF

*Kesenjangan*  
PENDAPATAN  
RUMAH TANGGA  
DAN KEMISKINAN  
DI INDONESIA



**MONOGRAF**  
**KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA**  
**DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE.,M.Si**



**pena persada**  
**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**MONOGRAF**  
**KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA**  
**DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Penulis:**

Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE.,M.Si

**ISBN:** 978-623-455-240-9

**Design Cover:**

Retnani Nur Brilliant

**Layout:**

Hasnah Aulia

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email : [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website : [penapersada.com](http://penapersada.com) Phone : (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama: 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa  
izin penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul **“MONOGRAF KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN DI INDONESIA”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Buku ini akan membahas masalah kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus menjadi sasaran utama pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak terhadap rendahnya daya beli masyarakat dan menyebabkan kemiskinan. Daya beli dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti harga BBM, Tarif Dasar Listrik. Tujuan dari buku ini adalah untuk melihat pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga dan kemiskinan di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil yang diperoleh bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan.

Penulis tentu menyadari jika buku ini isinya masih belum cukup sempurna. Penulis mengharapkan kritik maupun saran guna penyempurnaan buku ini. Semoga Tuhan YME membalas jasa semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, dengan harapan bermanfaat untuk pengembangan ilmunipengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kesenjangan Ekonomi.....	1
B. Indeks Pembangunan Manusia.....	4
BAB II KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT .....	9
A. Pengertian Kesenjangan Pendapatan.....	9
B. Teori Kesenjangan Pendapatan.....	11
BAB III INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA .....	14
A. Indek Pembangunan Manusia yang Disesuaikan dengan Kesenjangan (Inequality-adjusted Human Development Index / IHDI).....	14
B. Kesenjangan dalam Dimensi Indeks Pembangunan Manusia .....	15
C. Kerangka Perhitungan IHDI .....	19
BAB III HUBUNGAN KEMISKINAN, KENAIKAN BBM DAN TDL DENGAN KESENJANGAN PENDAPATAN .....	22
A. Hubungan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik terhadap Kesenjangan Pendapatan .....	22
B. Hubungan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik terhadap Kemiskinan.....	23
BAB IV KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA, KEMISKINAN DAN ANALISANYA.....	25
A. Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan di Indonesia. ....	25
B. Kemiskinan .....	27
C. Berbagai Uji Dalam Kajian.....	30
BAB V KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA, KEMISKINAN DAN KAJIANYA.....	46
A. Pengaruh harga BBM dan TDL terhadap Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga.....	46
B. Pengaruh harga BBM dan TDL terhadap Kemiskinan .....	48

BAB VI KESIMPULAN .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

**MONOGRAF**  
**KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA**  
**DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kesenjangan Ekonomi

Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian di suatu wilayah, adalah pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB. Secara lebih rinci sering pula diulas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses multidimensi dari pembangunan yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial termasuk di dalamnya pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan pendapatan regional belum tentu berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakatnya atau dapat dikatakan bahwa besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan gambaran bahwa seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut meningkat kesejahteraannya. Sangat mungkin terjadi, ekonomi meningkat pesat tetapi jumlah penduduk miskin serta kesenjangan juga meningkat. Kesenjangan yang tinggi akan menjadi penghambat dari kemakmuran, tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi, (Easterly, 2007).

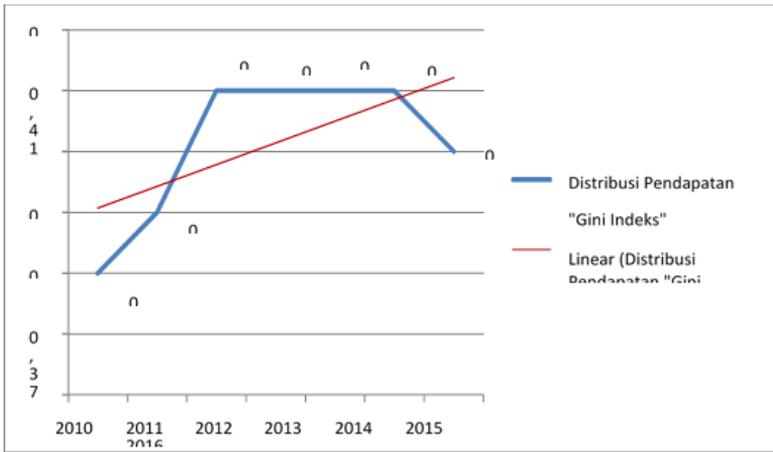
Kesenjangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolute, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi

pendapatan. Distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Adam Smith dan Marx berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba (Bigsten, 1987).

Penurunan angka kemiskinan merupakan sebuah tujuan utama dari pembangunan fundamental yang menjadi indikator keefektifan program-program pembangun (Maipita, 2010). Kemiskinan menyisakan permasalahan terbesar dalam cakupan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat sekitar 27 ribu orang miskin pada September tahun 2016, dan di September 2017 terjadi penurunan menjadi sekitar 26 ribu. Namun kondisi kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi.

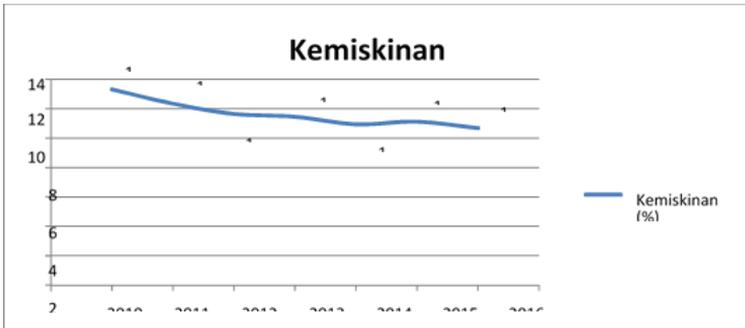
Tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Akibat adanya kesenjangan pendapatan tersebut khususnya rumah tangga konsumen akan mempengaruhi daya beli dan meningkatkan kemiskinan disuatu negara. Sen (1999) mencatat, "Kesenjangan pendapatan dapat terjadi secara substansial dari ketimpangan di beberapa 'ruang' lainnya, yaitu dalam hal variabel lain yang relevan, seperti kesejahteraan, kebebasan dan aspek kualitas hidup yang berbeda. Hal ini telah dibuktikan secara empiris oleh Samman dkk. (2011). Kesenjangan distribusi pendapatan, kesejahteraan, dan kemiskinan sekali lagi menarik perhatian banyak pihak, seperti perencana pembangunan, peneliti sosial, politisi, dan warga negara secara meluas. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak paralel secara otomatis dengan perluasan pekerjaan dan penurunan angka kemiskinan. Jadi, kebijakan ekonomi haruslah didesain kembali lebih kepada pro pertumbuhan, pro lowongan kerja, dan pro kemiskinan (Maipita, 2010).

Masalah kesenjangan yang terjadi di Indonesia terus menjadi sasaran utama pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari angka gini rasio kesenjangan Indonesia pada 6 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Gini Rasio tahun 2010-2016**  
**Sumber BPS, 2016**

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia masih dalam kategori "sedang" dan harus sangat diperhatikan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada bulan Desember 2015 mengklaim bahwa hanya 20 persen penduduk terkaya di Indonesia yang telah menikmati hasil pertumbuhan ekonomi satu dekade, yang menyiratkan bahwa 80 persen populasi (atau 200 juta orang secara absolut) tertinggal, (Indonesia- Investments). Kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik



**Gambar 1.2 Tren Angka Kemiskinan tahun 2010-2016**  
**Sumber BPS, 2017**

Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia sudah mulai menurun dari tahun 2010 sampai 2016. Indikator yang biasa digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melihat indeks pembangunan manusia (BPS, 2016). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (Rinaldi, 2017).

## **B. Indeks Pembangunan Manusia**

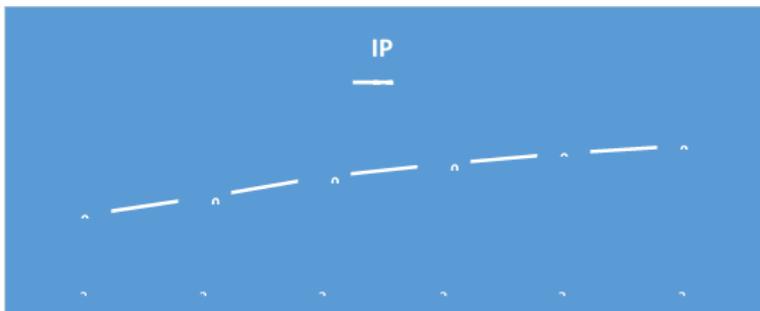
Pada tahun 2010 *Human Development Report* (HDR) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disesuaikan dengan kesenjangan (IHDI), yang memperhitungkan kesenjangan dari ketiga dimensi indeks pembangunan manusia dengan mengabaikan nilai rata-rata masing-masing dimensi sesuai dengan tingkat ketidaketaraannya, (HDR, 2016). Kesenjangan pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah di tahun-tahun ke depan. Hingga tahun 2015, kesenjangan pembangunan manusia masih terjadi, baik nasional maupun regional.

Kondisi pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 0.689, ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah dan peringkat 113 dari 188 negara (HDR, 2016) dan peringkat 5 di ASEAN. Dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia ASEAN**

Negara	HDI	Ranking
1. Singapura	0.925	5
2. Brunei	0.865	30
3. Malaysia	0.789	59
4. Thailand	0.740	87
5. Indonesia	0.689	113
6. Philipina	0.682	116
7. Vietnam	0.683	115
8. Laos	0.586	138
9. Kamboja	0.563	143
10. Myanmar	0.556	145

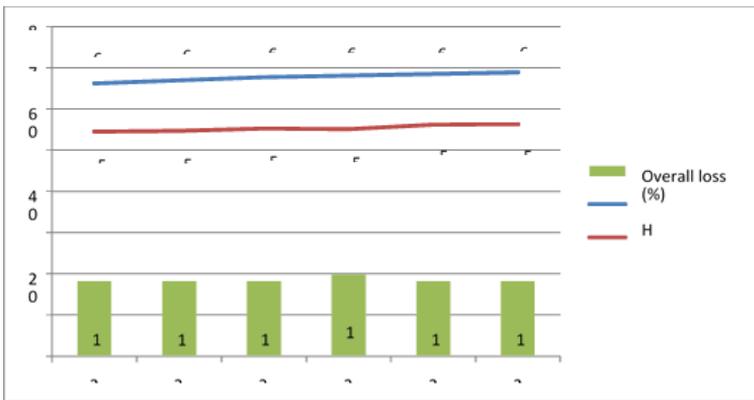
Sumber : <http://hdr.undp.org/en/countries>



**Gambar 1.3 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2010 2015**

Sumber HDR, 2016

Peningkatan IPM tersebut mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2015 kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia semakin besar dari tahun sebelumnya dilihat dari *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI) sebesar 0,563 (UNDP in Indonesia, 2017).



**Gambar 1.4 Tren HDI dan IHDI Indonesia Tahun 2010-2015**  
**Sumber HDR, 2016**

Dimensi yang digunakan dalam mengukur IHDI salah satunya adalah standar hidup yang layak (*a decent standard of living*) dilihat dari daya beli masyarakat. Daya beli ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan sebagainya. Naiknya harga BBM dan Tarif Dasar Listrik dapat menimbulkan kenaikan semua harga pada barang dan jasa (inflasi) yang berdampak kepada penurunan daya beli, khususnya masyarakat kelas bawah (Rahman, 2015). Namun, dengan adanya subsidi BBM dan listrik yang diberikan pemerintah dapat membantu peningkatan daya beli masyarakat. Akan tetapi konsekuensi dari pemberian subsidi tersebut menyebabkan anggaran belanja

pemerintah menjadi meningkat, untuk mengurangi anggaran tersebut pemerintah

harus mengambil kebijakan baru salah satunya pengurangan atau penghapusan subsidi. Maipita (2010) menjelaskan bahwa penerapan kontraksi kebijakan fiskal dengan cara pengurangan subsidi BBM dikarenakan untuk menurunkan defisit kas yang disebabkan oleh subsidi yang besar serta diikuti dengan meningkatnya harga CPO (*Crude Palm Oil*). Penghapusan subsidi BBM dan Listrik dianggap tidak boleh dilakukan karena dianggap akan menambah penderitaan dan melebarnya kesenjangan masyarakat (Khoiriyah, 2013). Oleh karena itu, dengan dihapusnya atau pengurangan subsidi dan diikuti kenaikan harga BBM dapat menurunkan daya beli masyarakat yang akan berdampak terhadap kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kemiskinan. Maipita (2010) menyatakan dalam hasil simulasinya bahwa peningkatan subsidi menghasilkan penurunan harga pada sektor tambang dan galian; manufaktur; dan listrik, gas, dan air. Jadi subsidi sangat membantu masyarakat pada umumnya. Dari kedua pendapatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehilangan atau pengurangan dari subsidi BBM dapat menimbulkan masalah ekonomi yaitu menurunkan daya beli masyarakat dan menambah angka kemiskinan, adanya subsidi dapat membantu masyarakat dalam bidang konsumsinya, BPHMIGAS (Juni, 2010) menyatakan ketika harga BBM naik maka kemiskinanpun akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena ikut naiknya harga barang-barang pokok lainnya. Hal ini senada dengan teori yang pernah disampaikan oleh Guy Standing bahwa kemiskinan dapat timbul dari (a) resiko-resiko akibat guncangan ekonomi seperti naiknya harga-harga, penyakit, keelakaan, bencana alam; (b) kemampuan warga atau kelompok warga yang terbatas untuk memulihkan diri sesudah gangguan ekonomi, dan akibatnya kesenjangan semakin besar.

Dari data Susenas (Maret, 2017) Pengeluaran konsumsi tertinggi selain makanan berasal dari sub-kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti pengeluaran listrik, pengeluaran BBM. Selain itu pengeluaran rumah sewa juga mengalami kenaikan ditahun sebelumnya diakibatkan karena naiknya harga dari masing-masing subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga tersebut.



**Gambar 1.5 Pengeluaran Konsumsi Sub-Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga**  
Sumber Susenas, Maret 2017

Pada Maret 2017, secara nasional pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik menjadi salah satu dari tiga besar pengeluaran dalam subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, yaitu sebesar Rp25.623,-. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pada Maret 2016 yang sebesar Rp25.311,-, terjadi peningkatan sebesar 1,23 persen menjadi Rp25.623,- pada Maret 2017.

## BAB II

# KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT

### A. Pengertian Kesenjangan Pendapatan

Kesejahteraan adalah fungsi sumber daya dan kemampuan untuk mengubahnya menjadi prestasi, atau fungsi. Pendekatan ini memiliki implikasi tertentu dalam kasus ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan mengacu pada "perbedaan, variasi dan perbedaan yang berbeda" dalam karakteristik individu dan kelompok (UNDP,2016). Ketidaksetaraan menambahkan dimensi moral yang mengacu pada subset dari ketidaksetaraan yang dianggap tidak adil (Norheim and Asada's, 2009). Ketidakadilan dan ketidaksetaraan merupakan bagian integral dari pendekatan kemampuan karena keterkaitannya dengan keadilan distributif. Seperti yang dikemukakan di HDR 2011, "Ketidaksetaraan dalam hasil sebagian besar merupakan hasil akses yang tidak setara terhadap kemampuan" (UNDP, 2011). Jika orang-orang di dalam suatu masyarakat memiliki kemampuan yang sama, kita tentu tidak akan mengharapkan hasil yang sama karena orang memiliki preferensi dan nilai yang berbeda. Tapi kita bisa merasa yakin bahwa hasil tersebut muncul karena perbedaan pilihan orang-orang daripada hambatan kemampuan mereka untuk menggunakan pilihan mereka (Chiappero & Martinetti, 2009).

Kesenjangan (inequality) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Menurut Sen (1981) dan Forster et al. (1984) dalam Annim et al. (2012), hubungan yang erat antara kesenjangan dan kemiskinan adalah bahwa kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Sedangkan Barber (2008) dalam Annim et al. (2012) memandang hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada

tulisannya Rodriguez-Paso dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan kesenjangan, baik yang sifatnya spasial maupun inter-personal. Lebih lanjut dinyatakan hubungan ini lebih kuat antara kesenjangan antar individu (interpersonal) dengan kemiskinan dibandingkan dengan kesenjangan spasial.

Kesenjangan Pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio. Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2009) mengatakan, kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh a) pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, b) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, c) inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, d) investasi. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan, penurunan kesejahteraan, dan kemiskinan menarik perhatian berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, politisi, peneliti sosial dan ekonomi, dan masyarakat luas (Maipita, 2011).

Kesenjangan antardaerah adalah realita yang menggambarkan jarak ekonomis dan sumber daya manusia antardaerah sebagai akibat dari pembangunan yang terjadi selama beberapa periode terakhir. Untuk membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih pesat dan inklusif, dalam laporan tahunan Bank Dunia yang berjudul, "World Development Report 2009 : Reshaping Economic Geography" menganjurkan proses transformasi spasial di Asia Timur, termasuk Indonesia dengan membangun 3D, yakni kepadatan (density), mengurangi jarak (distance), dan menghilangkan sekat atau ketimpangan (division), dimana semakin tinggi kepadatan penduduk akan mendorong pertumbuhan kota, semakin pendek jarak antarlokasi, maka semakin cepat perusahaan dan tenaga kerja berpindah mendekati peluang ekonomi, dan apabila semakin kecil sekat atau ketimpangan antardaerah, maka dapat memperkecil hambatan masuk ke pasar global (Kuncoro, 2012).

Todaro dan Smith (2004), menyatakan sudah jelas bahwa pembangunan memerlukan GNP yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuh GNP, tetapi siapakah yang menumbuhkan GNP, sejumlah besar masyarakat yang ada didalam sebuah negara atautkah hanya segelintir orang didalamnya. Jika yang menumbuhkannya hanyalah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNP itupun hanya dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun semakin parah.

## B. Teori Kesenjangan Pendapatan

### 1. Indeks Gini

Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur penyebaran distribusi pendapatan, konsumsi, atau kekayaan jenis gangguan lainnya (Jedrzejczak, 2008). Indeks gini adalah suatu koefisien mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (garis pemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. *World Bank* (1990) memperkenalkan Gini Rasio sebagai ukuran ketidaksetaraan pendapatan (Torras, 1998).

Oshima (1976) menyatakan Untuk memberikan penilaian tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (a) Indeks Gini kurang dari 0,4 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah; (b) Indeks Gini antara 0,4- 0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sedang; (c) Indeks Gini lebih besar atau sama dengan 0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. *Gini Rasio* dihitung dengan menggunakan rumus, (Haughton and Khandker, 2009):

$$GR = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k (f_i - f_{i-1})(y_i + y_{i-1})}{2}$$

Dimana,

$k$  : banyaknya kelas/kelompok

$f_i$  : proporsi jumlah rumahtangga kumulatif kelas ke- $i$

$y_i$  : proporsi jumlah pendapatan rumahtangga kumulatif kelas ke- $i$

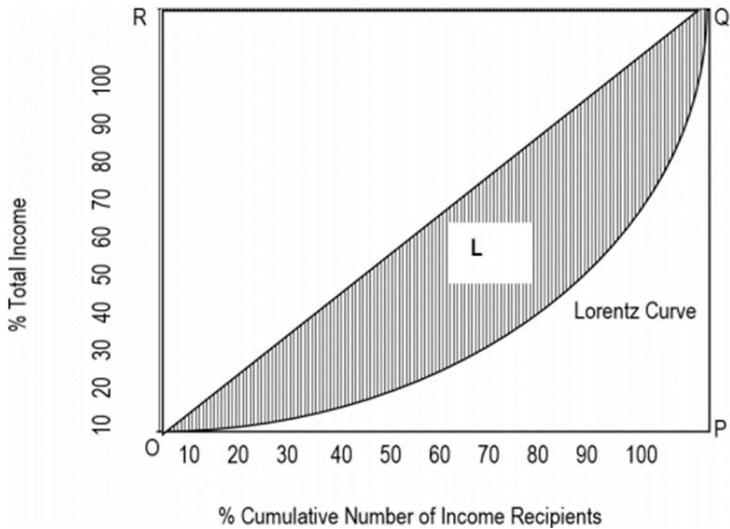
**Tabel 2.1**  
**Indikator Ketimpangan Gini Rasio**

Nilai Gini Rasio	Tingkat Kesenjangan
$< 0,35$	Rendah
$0,35-0,5$	Sedang
$>0,5$	Tinggi

Sumber : <http://statistikaterapan.files.wordpress.com>

## 2. Kurva Lorenz

Salah satu cara untuk menunjukkan distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Analisis kurva Lorenz bertujuan untuk menunjukkan tingkatan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan (Perkins, et.al, 2001). Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan lapisan penduduk secara kumulatif. Dengan kondisi distribusi pendapatan yang adil,  $X$  persen dari populasi akan menerima  $X$  persen dari total pendapatan. Di kurva Lorenz, situasi ini digambarkan sebagai garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas (OQ) (Maipita,2017).



**Gambar 2.1 Derajat Kemerataan/Ketidakterataan Menurut Kurva Lorenz**  
**Sumber Maipita, 2017**

Dalam gambar 2.1 di atas, dijelaskan bahwa semakin dekat kurva Lorenz ke garis diagonal (garis pemerataan sempurna), maka distribusi pendapatannya semakin merata. Sebaliknya semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

## **BAB III**

### **INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA**

#### **A. Indek Pembangunan Manusia yang Disesuaikan dengan Kesenjangan (Inequality-adjusted Human Development Index / IHDI)**

Salah satu cara untuk mengurangi ketidaksetaraan di masyarakat adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat kelas middleclass, (Maipita, 2017). Sebagai ukuran kesejahteraan, pendapatan nasional memiliki dua kelemahan penting. Ini menunjukkan kehilangan variasi dalam hal-hal yang dapat dan tidak dapat dibeli oleh pendapatan dan kehilangan variasi klaim orang terhadap pendapatan agregat tersebut. Kedua kritik ini, dalam hal luas dan distribusi pembangunan manusia sangat penting bagi langkah menuju pendekatan pembangunan manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index / HDI).

HDI menanggapi kritik pertama ini dengan menggabungkan dua dimensi, kesehatan dan pendidikan tambahan, ke dalam basis informasinya. Namun, perhatian kedua yang sangat penting bagi pendekatan pembangunan manusia terutama tidak ada. Secara praktis, ini berarti bahwa setiap dua negara yang memiliki pencapaian rata-rata yang sama akan memiliki nilai IPM yang sama walaupun memiliki distribusi pencapaian yang sangat berbeda. Ketidaksetaraan diabaikan oleh HDI tradisional walaupun ada alasan mendasar untuk menghubungkan ketimpangan yang lebih besar dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah. Sebagai tanggapan terhadap kritik ini, HDI alternatif yang disesuaikan dengan ketimpangan pendapatan dilaporkan dalam Human Development Report (HDR) dari tahun 1991 sampai 1994, namun dihentikan karena alasan metodologis. Sejak itu, beberapa penulis menyerukan agar ketidaksetaraan dimasukkan ke dalam HDI secara lebih substantif, (Alkire dan

Foster, 2010). Pada tahun 2010 *Human Development Report* (HDR) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disesuaikan dengan kesenjangan (IHDI), yang memperhitungkan kesenjangan dari ketiga dimensi indeks pembangunan manusia dengan mengabaikan nilai rata-rata masing-masing dimensi sesuai dengan tingkat ketidakesetaraannya, (HDR, 2016).

HDI mewakili rata-rata prestasi pembangunan manusia nasional dalam tiga dimensi dasar yang membentuk IPM: kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Seperti semua rata-rata, ini menyembunyikan disparitas dalam pembangunan manusia di seluruh populasi di negara yang sama. Dua negara dengan distribusi pencapaian yang berbeda masih dapat memiliki nilai IPM rata-rata yang sama, (HDR, 2016).

IHDI memperhitungkan tidak hanya prestasi rata-rata suatu negara terhadap kesehatan, pendidikan dan pendapatan, tetapi juga bagaimana pencapaian tersebut didistribusikan di antara penduduknya dengan "mengabaikan" nilai rata-rata masing-masing dimensi sesuai dengan tingkat ketidakesetaraannya, (HDR, 2016).

## **B. Kesenjangan dalam Dimensi Indeks Pembangunan Manusia**

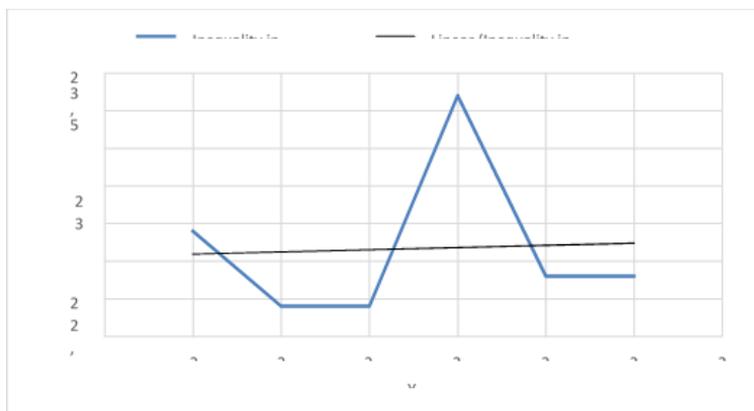
### **1. Kesenjangan Pendidikan**

Pendidikan merupakan unsur penting perkembangan manusia. Ini berkontribusi pada kesejahteraan individu secara instrumental dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup dan secara intrinsik dengan meningkatkan kemampuan dan kebebasan individu. Pendidikan sangat mempengaruhi kesejahteraan generasi masa depan melalui transmisi antargenerasi dan orang tua berpendidikan lebih baik, memiliki anak yang lebih terdidik dan lebih sehat, (Dre`ze and Sen, 2002, pp. 38–40). Pendidikan juga mempengaruhi kesejahteraan anggota masyarakat lainnya karena eksternalitas positif yang dihasilkannya (Tilak, 2008). Pendidikan, melalui efek spillover, menciptakan aset baru dan meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa membuat

orang menjadi lebih buruk (Thomas et al., 2001). Jadi pendidikan sangat erat kaitannya dengan perkembangan manusia yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pendidikan bagi manusia diantaranya pendidikan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang luas bagi manusia. Pendidikan juga menjadikan manusia lebih baik dan berkarakter sehingga membuat manusia lebih beradap. Menurut BPS (2016 : 4) mengungkapkan bahwa pentingnya pendidikan dapat membantu manusia dalam menciptakan suatu gambaran yang jelas mengenai hal disekitarnya, serta dapat menghilangkan kebingungan yang dialami. Jadi, pendidikan memegang peranan yang penting dalam membantu kemajuan suatu bangsa, dan menjadikan setiap warga negara mampu menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini.

Analisis kesenjangan capaian pendidikan dapat dilihat dari dua aspek yakni keterbandingan antar wilayah dan antar individu. Untuk keterbandingan antar wilayah, analisis kesenjangan capaian pendidikan dilakukan dengan membandingkan capaian rata-rata lama sekolah antar provinsi dengan mengidentifikasi semua provinsi khususnya Indonesia yang memiliki capaian rata-rata lama sekolah yang tinggi dan mana yang memiliki capaian yang rendah. Kemudian analisis keterbandingan antar individu, diukur dengan melihat ketimpangan lama sekolah yang dicapai setiap individu penduduk yang dalam hal ini diukur dengan indeks gini, (BPS 2016 : 11).



Gambar 2.2 Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Sumber : HDR, 2016

Secara umum, kesenjangan pendidikan di Indonesia berfluktuasi dari tahun 2010-2015. Dilihat dari gambar diatas, pada tahun 2010 ke 2012 kesenjangan pendidikan menurun dari 21,4 % menurun ke 20,4%. Namun, pada tahun 2013 kesenjangan pendidikan naik mencapai 23,2 % dan kembali turun di tahun 2014 mencapai 20,8 %. Jika dilihat dari tren linier kesenjangan Indonesia meningkat.

## 2. Kesenjangan Kesehatan

Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia, (BPS,2016). Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (Farid, 2015). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang sangat produktif secara sosial ekonomis.

Hubungan antara ketidaksetaraan dan fokus kesehatan pada tiga jalur utama: pertama, ketidaksetaraan yang tinggi dikaitkan dengan kemiskinan yang lebih besar, semua hal lain setara, dan mungkin segregasi, keduanya memiliki kesehatan buruk pada kesehatan; kedua, bahwa hal itu dapat mengikis kohesi sosial; dan ketiga, bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap kebijakan terkait kesehatan (Subramanian dan Kawachi 2004, Kondo et al., 2009).

Ketidaksetaraan dalam kesehatan di Inggris telah banyak dibahas di jurnal medis, kesehatan, dan ilmu sosial, dengan data terbaru menunjukkan pelebaran ketidaksetaraan antara wilayah Inggris. Namun di Indonesia sangat sedikit sekali membahas hal tersebut. Ketidaksetaraan semacam itu juga menjadi fokus beberapa target pemerintah. Di negara-negara kaya lainnya, ketimpangan dalam kesehatan dipelajari secara luas dan tunduk pada perhatian pemerintah. Ketimpangan dalam mortalitas antar daerah mencerminkan ketidaksetaraan produk domestik bruto per kapita, (Dorling,2006). Jadi kesenjangan kesehatan tersebut sangat merugikan suatu negara dalam mencapai pembangunannya.

Menurut Climent (2008) Meningkatnya harapan hidup dan akumulasi modal manusia telah meningkat sejak periode pasca Perang Dunia II di sebagian besar belahan dunia. Namun, terlepas dari konvergensi harapan hidup di seluruh negara selama periode ini (lihat, misalnya, Becker et al., 2005), pada tahun 2000 masih

ada kesenjangan besar antara dunia kaya dan dunia miskin: harapan hidup adalah 78 tahun di negara-negara OECD, di mana kesenjangan dengan negara-negara kaya meningkat saat ini karena AIDS meluas. Demikian pula, disparitas yang mencolok dalam modal manusia juga nyata.

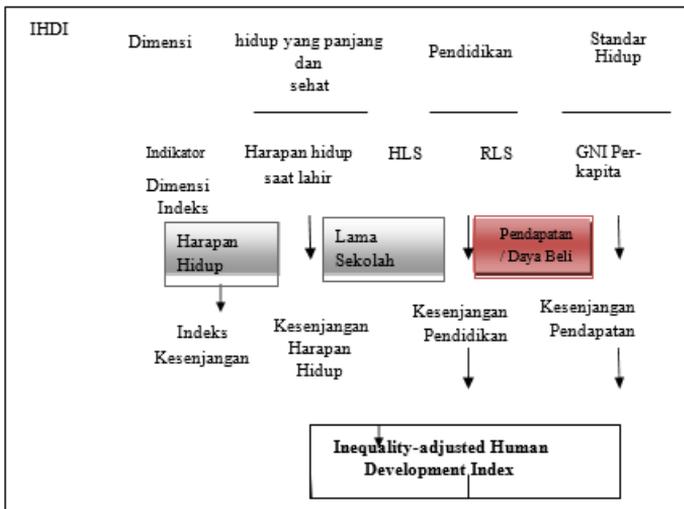
Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan kesehatan dilihat dari penduduk yang hidup dengan perilaku dan lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Teori Henrik L Blum menyatakan derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian dan angka kesakitan, (Notoadmodjo, 2007). Angka kematian menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2015 capaian AHH Indonesia sebesar 70,78 tahun atau meningkat hanya 0,19 poin dibandingkan tahun 2014. Sementara jika dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, AHH tahun 2015 meningkat sebesar 0,97 poin (AHH tahun 2010 sebesar 69,81 tahun), (BPS, 2016).

### 3. Kesenjangan Standart Hidup Layak

Indikator yang digunakan sebagai pengukuran standart hidup layak adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) yang dihitung berdasarkan pendapatan atau konsumsi masyarakat, (HDR, 2016).

## C. Kerangka Perhitungan IHDI



Sumber : HDR, 2016

Masalah ekonomi seperti Kemiskinan dan ketidaksetaraan ditemukan disemua masyarakat kontemporer, meskipun mereka lebih terlihat dan terwujud di beberapa masyarakat daripada di negara lain. Kemiskinan dapat dikatakan masalah paling luas dan serius yang dihadapi dunia modern, kondisi seperti kelaparan, tunawisma, penyakit yang dapat dicegah, pengangguran, dan buta huruf sebagai unsur kemiskinan, (Dziedzic, 2006). (Sundaramand and Tendulkar 2003) menyatakan dalam literatur tentang kebijakan, ada asumsi yang tersebar luas bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Asumsi ini terkadang dibuat eksplisit tetapi lebih sering dibiarkan tersirat. Jika ada peningkatan jumlah dan proporsi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, anggapannya adalah peningkatan ketidaksetaraan. Tentu saja, diakui bahwa ada ketidaksetaraan di antara orang miskin itu sendiri. Ini telah menyebabkan konstruksi indeks untuk menguji kedalaman dan intensitas kemiskinan.

Definisi kemiskinan tradisional telah berfokus pada pendapatan dan kekayaan, atau kurangnya uang atau harta benda. Definisi kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan, yang diwarisi dari ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, benar-benar dominan hingga tahun 1960-an, ketika fokus kebijakan pembangunan kurang lebih hanya pada perluasan pendapatan moneter. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, semakin populer untuk memperluas definisi kemiskinan ke aspek-aspek non-materi lain dari kesejahteraan manusia. Memang, evolusi konsep kemiskinan mencerminkan perubahan dalam teori dan praktik pembangunan secara umum, dan analisis penyebab kemiskinan pada khususnya. Akibatnya, upaya pengukuran, deskripsi dan analisis kemiskinan telah meluas, (Angelsen. A and Wunder, 2006).

Dalam *Human Development Report 1997*, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan unsur lain pada definisi standar kemiskinan yaitu Indeks

Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index / HPI), (UNDP, 1997). Daripada hanya mengandalkan pada istilah absolut dan kemiskinan relatif, Program Pembangunan PBB menggunakan konsep kemiskinan pendapatan dan kemiskinan manusia. Di konsep kemiskinan pendapatan, ada istilah kemiskinan ekstrim dan kemiskinan keseluruhan. Kemiskinan ekstrim adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar, yang didefinisikan oleh persyaratan kalori minimum. Secara keseluruhan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar selain makanan, seperti tempat tinggal, pakaian, dan energi, bersama dengan makanan. Konsep kemiskinan manusia lebih lanjut dipecah menjadi efek langsung dan tidak langsung dari kemiskinan pada kehidupan manusia, (Dziedzic, 2006).

Berdasarkan analisis Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak satu dekade terakhir mampu mengurangi angka kemiskinan dari tahun 1999 sebesar 24,0 persen menjadi 11,3 persen pada tahun 2014. Tetapi dalam dua tahun terakhir, pengurangan angka kemiskinan sangat lambat yakni hanya 0,7 persen dan merupakan angka penurunan kemiskinan yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir (World Bank, 2014).

### BAB III

## HUBUNGAN KEMISKINAN, KENAIKAN BBM DAN TDL DENGAN KESENJANGAN PENDAPATAN

#### A. Hubungan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik terhadap Kesenjangan Pendapatan

Ketidaksetaraan telah lama menjadi isu penting di kalangan akademisi maupun pemerintah. Namun, peneliti atau politisi sering fokus pada pendapatan atau ketidaksetaraan kekayaan sementara sedikit menjelaskan ketidaksetaraan konsumsi. Mengingat bahwa konsep yang terakhir sangat penting. Dalam segi empat aspek berikut, diperlukan pengukuran yang tepat tentang evolusinya. Pertama, di bidang ekonomi mikro, pendapatan bisa hanya membawa utilitas ke konsumen tertentu jika dibelanjakan. Karena itu, ketidaksetaraan konsumsi lebih langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat kualitas. Selain itu, konsumsi juga bisa dianggap sebagai fungsi pendapatan permanen (terlihat) atau sementara (tersembunyi), kekayaan dan sumber daya sosial lainnya. Jadi memperkirakan ketidaksetaraan konsumsi adalah cara yang lebih komprehensif untuk mengukur kesejahteraan sosial. Kedua, dari sudut pandang ekonomi makro, ketidaksetaraan konsumsi membantu memahami pemulihan permintaan agregat (Auclert & Rognlie, 2016).

Dari sisi konsumsi, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kecil di Indonesia merupakan net consumer dalam sub-kelompok perumahan (listrik, BBM, dan Rumah Sewa). Ikhsan (2001) menyatakan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 10 persen akan menyebabkan penambahan penduduk miskin sebesar satu persen, atau lebih dari dua juta orang. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) memicu terjadinya inflasi dari sisi *supply (cost push inflation)*, yang mengakibatkan pengeluaran rumah tangga terganggu (Rahman, 2015).

Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin guna mengurangi beban masyarakat. Subsidi yang telah diberikan meliputi subsidi BBM dan subsidi Listrik. Maipita (2011) menyatakan pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Namun, ada masalah defisit anggaran akibat pengeluaran subsidi yang besar, terutama subsidi bahan bakar. Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk secara mengejutkan mengurangi subsidi bahan bakar dan listrik. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi makro dan peningkatan tingkat kemiskinan, perbedaan pendapatan, dan kedalaman kemiskinan. Damuri (2003) menemukan bahwa ekspansi fiskal secara signifikan mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Listrik dan BBM merupakan input dalam produksi serta barang yang sangat banyak memberikan *multiplier effect* terhadap harga barang lainnya. Kenaikan tarif listrik dan harga BBM dapat memicu kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang lainnya, inflasi, menambah pengeluaran masyarakat, menurunkan daya beli masyarakat dan akhirnya membentuk siklus mengerucut pada perekonomian. Meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat akan mengurangi daya beli dan akhirnya mengurangi konsumsi, serta melebarnya kesenjangan masyarakat (Maipita, 2017)

## **B. Hubungan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik terhadap Kemiskinan**

Kenaikan harga bahan bakar minyak, ditenggarai akan meningkatkan tingkat Inflasi yang akan menaikkan juga TDL, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan menambah tingkat kemiskinan. (Pratama, 2014) menyatakan rencana peningkatan harga BBM akan menciptakan-expected inflation yaitu tingkat inflasi yang terjadi sebelum harga BBM tersebut dinaikan, hal ini sesuai dengan teori inflasi, yaitu masyarakat akan meneurun daya beli dan tingkat

kesejahteraannya dikarenakan kenaikan harga barang secara umum dengan asumsi tingkat pendapatannya tetap.

Tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahalnya biaya pendidikan di Indonesia jika diukur dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan tidak adanya skill dan kompetensi masyarakat untuk bisa lebih berdaya, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dari masyarakat tersebut dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ingkaran kemiskinan.

## BAB IV

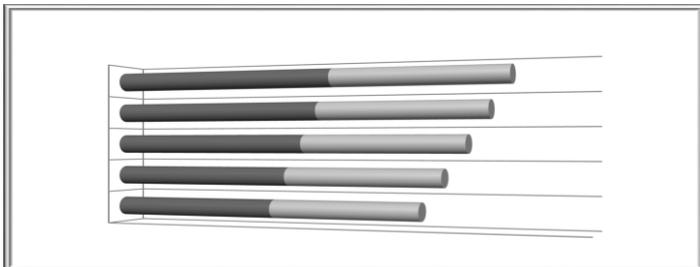
### KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA, KEMISKINAN DAN ANALISANYA

#### A. Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan di Indonesia.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan perkapita. Selama tahun 2012-2016, PDB per Kapita Indonesia selalu meningkat. PDB per kapita di Indonesia merangkak naik dari Rp 35,10 juta pada 2012 menjadi Rp 47,96 juta pada tahun 2016 jika dihitung atas dasar harga berlaku atau dari Rp 31484,50 di tahun 2012 menjadi Rp 36,46 juta jika dihitung atas dasar harga konstan. Nilai PDB per kapita diperoleh dari nilai PDB dibagi dengan jumlah penduduk, (BPS, 2017).



Sumber : BPS



**Gambar 4.1 Produk Domestik Bruto per Kapita (ribu rupiah),  
Tahun 2012-2016**

Meskipun pendapatan perkapita cenderung selalu meningkat, namun pendapatan per kapita dapat bias disebabkan suatu kelompok tertentu saja yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan adalah kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi, maupun kesenjangan pendapatan antar individu. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia sangat terlihat ketika melihat kontribusi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dalam pembentukan PDB dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.

Distribusi pendapatan yang tidak merata/kesenjangan pendapatan terlihat dari hampir 25 persen PDB dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 0,02 persen dari total penduduk (Indonesia-Investments,2017). Hal ini mencerminkan masih timpangnya kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Indonesia.

Pada periode Maret 2015 - Maret 2016, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,402 pada 2015 menjadi menjadi 0,397 pada tahun 2016. Penurunan ketimpangan pendapatan terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, (BPS, 2017). Pada gambar 4.1 terlihat ketimpangan dari tahun 2002 sampai 2016 berfluktuasi.

**Tabel 4.1 Gini Rasio Indonesia Tahun 2007-2016**

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gini	0.36	0.35	0.37	0.38	0.39	0.41	0.41	0.41	0.41	0.4
Rasio										

Sumber : BPS

Dilihat dari tabel 4.2, bahwa keadaan kesenjangan pendapatan tahun 2007- 2016 mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 gini rasio berada pada nilai indeks 0,37

kemudian di tahun berikutnya 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan yang artinya kesenjangan pendapatan meningkat. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 nilai indeks gini stagnan 0,41 dan di tahun 2016 menurun ke indeks 0,40.

## **B. Kemiskinan**

Tujuan pertama yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengakhiri kemiskinan (BPS, 2016). SDGs merupakan suatu bentuk aksi dunia terhadap beragam permasalahan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemiskinan merupakan masalah yang terus menerus menjadi agenda dan sasaran kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintah seringkali gagal dalam menyusun skema pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, pemerintah pada masa orde baru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan masalah distribusi pendapatan (pemerataan hasil-hasil ekonomi). Pemerintah waktu itu mengandalkan "*trickle down effect*" sebagai strategi mencapai pemerataan yang pada akhirnya waktu juga yang menjawab bahwa strategi menetes ke bawah tersebut tidak efektif.

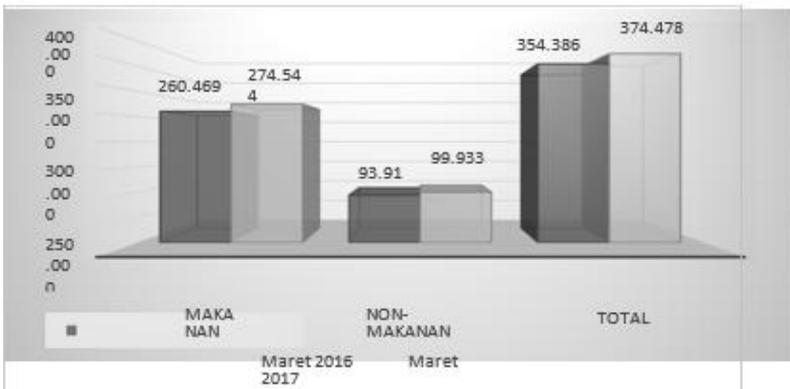
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin, hal ini tercermin dalam indeks gini yang mencapai 0,4, artinya adalah terjadi disparitas yang sangat besar dalam penguasaan kekayaan atau kesejahteraan antara golongan terkaya dengan golongan yang termiskin dalam masyarakat Indonesia.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diimbangi dengan kualitas penduduk akan menjadi kendala pembangunan. Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang besar juga berarti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia tercukupi. Namun hingga saat ini, pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin (JPM) sangat dipengaruhi oleh kondusifitas perekonomian karena kemiskinan berhubungan langsung dengan pendapatan. Sedangkan pendapatan bersumber dari aktifitas ekonomi. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 34 persen sampai dengan tahun 1999. Pada tahun 2002 dan 2005 mengalami penurunan bahkan di tahun 2005 rasio penduduk miskin lebih rendah dari masa krisis. Tetapi pada tahun 2006 rasio penduduk miskin kembali meningkat menjadi 17,75 persen, lebih tinggi dari kondisi sebelum krisis, 17,47 persen. Penyebabnya adalah meningkatnya laju inflasi pada tahun 2006 akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Oktober 2005.

Bila konsumsi rumah tangga yang relatif cepat pulih setelah dilanda krisis ekonomi, maka tidak demikian halnya dengan JPM. JPM memiliki tingkat kelembaman yang tinggi yang ditunjukkan oleh kelambatannya untuk pulih setelah terkena krisis ekonomi. Ini artinya bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang berada pada kondisi kritis (siapa miskin) atau disebut juga hampir miskin. Kelompok penduduk ini sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah harus juga memperhatikan penduduk yang hampir miskin karena keberadaan mereka yang sangat rentan masuk menjadi kemiskinan absolut.

Tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan (kondisi Maret 2016 dan Maret 2017). Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Pada periode Maret 2016-Maret 2017, garis kemiskinan meningkat dari Rp 354,386,- menjadi Rp 374,478,- perkapita per bulan atau sebesar 5,67 persen (Gambar 4.2). Keadaan serupa terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu masing-masing meningkat sebesar 5,79 persen dan 5,19 persen.



**Gambar 4.2.**  
**Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota + Desa, Maret 2016 -**  
**Maret 2017 (Rp/Kapita/Bulan)**  
**Sumber : BPS**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen), turun dibanding Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). Selama periode Maret 2016-Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 0,33 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,57 juta orang.

### C. Berbagai Uji Dalam Kajian

#### 1. Estimasi Model

##### a. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Sebelum melakukan estimasi model ECM, yang perlu dilihat apakah variabel-variabel yang digunakan telah stasioner. Bila data tidak stasioner maka akan diperoleh regresi yang palsu (*spurious*), uji untuk melihat data tersebut stasioner adalah uji akar unit. Penggunaan uji ini sangat penting untuk mendeteksi akar-akar unit dalam model ini, (Fuller, 1976. Dickey and Fuller, 1979, and Hasza and Fuller, 1979). Keberadaan unit root problem bisa terlihat dengan cara membandingkan nilai t-statistics hasil regresi dengan nilai test Augmented Dickey Fuller atau dengan melihat probabilitasnya, (Basuki, 2012). Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikan  $\alpha = 5\%$ , artinya data terdapat unit root atau data tidak stasioner. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikan  $\alpha = 5\%$ , artinya data tersebut tidak terdapat unit root atau data stasioner. Pada tahapan pengujian awal pada model 1 dan 2 diketahui hasil kointegrasi untuk melihat residual tidak stasioner pada tingkat level. Maka penulis melakukan tranformasi data kebentuk logaritma. Hasil dari uji akar unit model 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Nilai Uji Akar Unit Model 1 dengan Metode**  
**Augmented Dickey Fuller pada Level**

Variabel	t-Statistik	Prob*	Kesimpulan
Kesenjangan Pendapatan	-1.836186	0.3495	Signifikan pada $\alpha=5\%$
LnHBBM	-2.067262	0.2586	Signifikan pada $\alpha=5\%$
LnTDL	-1.870796	0.3339	Tidak Signifikan pada $\alpha=5\%$

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

**Tabel 4.3**  
**Nilai Uji Akar Unit Model 2 dengan Metode**  
**Augmented Dickey Fuller pada Level**

Variabel	t-Statistik	Prob*	Kesimpulan
Kemiskinan	-0.018758	0.9412	Signifikan pada $\alpha=5\%$
LnHBBM	-2.067262	0.2586	Signifikan pada $\alpha=5\%$
LnTDL	-1.870796	0.3339	Tidak Signifikan pada $\alpha=5\%$

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Berdasarkan hasil perhitungan kedua model dengan metode uji Augmented Dickey Fuller pada tingkat level diperoleh bahwa model 1 seluruh data variabel nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai Signifikan pada  $\alpha=5\%$ , Sehingga tidak ada variabel stasioner pada tingkat tingkat level dasar atau masih memiliki masalah akar unit. Kemudian model 2 juga tidak ada variabel yang stasioner pada tingkat level.

b. Uji Derajat Integrasi

Jika data tidak stasioner pada tingkat level uji selanjutnya adalah uji derajat integrasi, ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur pada tingkat diferensi ke berapa data semua variabel stasioner. Metode yang digunakan adalah metode Augmented Dickey Fuller yaitu dengan membandingkan nilai hitung ADF dengan nilai kritis mutlak ADF  $\alpha=5\%$  atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan signifikan  $\alpha=5\%$  (0,05). Apabila terdapat satu variabel yang stasioner pada tingkat level dan dua variabel tidak stasioner pada tingkat level, maka data tersebut harus dilakukan pengujian dengan tingkat 1<sup>st</sup>diferensiasi sampai semua data stasioner pada level yang sama. Adapun hasil uji ADF model 1 dan model 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Nilai Uji Derajat Integrasi Model 1 Pada Tingkat Difference**

Variabel	Uji Derajat Integrasi			
	Level		1st Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
<b>Ineq. Income</b>	-1.870796	0.3339	-3.365116	0.0349
<b>LH_BBM</b>	-1.836186	0.3495	-3.888150	0.0134
<b>LTDL</b>	-2.067262	0.2586	-6.105948	0.0004

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

**Tabel 4.5**  
**Nilai Uji Derajat Integrasi Model 2 Pada Tingkat**  
**Difference**

Variabel	Uji Derajat Integrasi			
	Level		1st Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
Lkemiskina	-0.018758	0.9412	-4.991444	0.0021
n				
LH_BBM	-1.836186	0.3495	-3.888150	0.0134
LTDL	-2.067262	0.2586	-6.105948	0.0004

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Pada tabel 4.4 dan tabel 4.5, diketahui bahwa hasil uji derajat integrasi diatas, telah stasioner pada tingkat *1st Difference*. Oleh sebab itu, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi apakah data terkointegrasi. Untuk itu diperlukan uji kointegrasi.

c. Uji Kointegrasi

Penelitian ko-integrasi telah membuat kemajuan besar sejak teorema representasi Granger yang telah terbukti dalam Engle dan Granger (1987) (Hatanaka, 1998). Uji kointegrasi digunakan untuk memberi indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang (cointegration relation). Kointegrasi terjadi apabila variabel independen dan variabel dependen sama-sama merupakan suatu trend, sehingga masing-masing tidak stasioner. Namun apabila keduanya diregresikan akan menyebabkan kombinasi liniernya menjadi stasioner (Muhammad, 2014). Hasil uji kointegrasi didapatkan dengan membentuk residual yang diperoleh dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen secara OLS. Adapun model

yang di gunakan pada regresi ini adalah sebagai berikut:

Model 1:

$$\Delta \ln e_t = w_0 + w_1 \log \text{BBM}_t + w_2 \log \text{TDL}_t + \epsilon_t$$

Model 2:

$$\Gamma \text{B} \text{O} \text{A} \text{G} \text{L} \text{D} \text{L}^t = \text{M} \text{O} + \text{M} \text{1} \text{J} \text{U} \text{B} \text{B} \text{W}^t + \text{M} \text{2} \text{L} \text{D} \text{I}^t + \epsilon^t$$

Dari hasil uji OLS dari masing-masing model diatas akan memunculkan residual. Residual tersebut yang di simbolkan ECT harus stasioner pada tingkat level untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi. Hasil penelitian ini dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Kointegrasi**

Model	Variabel	t-Statistik	Prob
1	ECT	-3.858.949	0.0130
2		-3.669088	0.0211

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

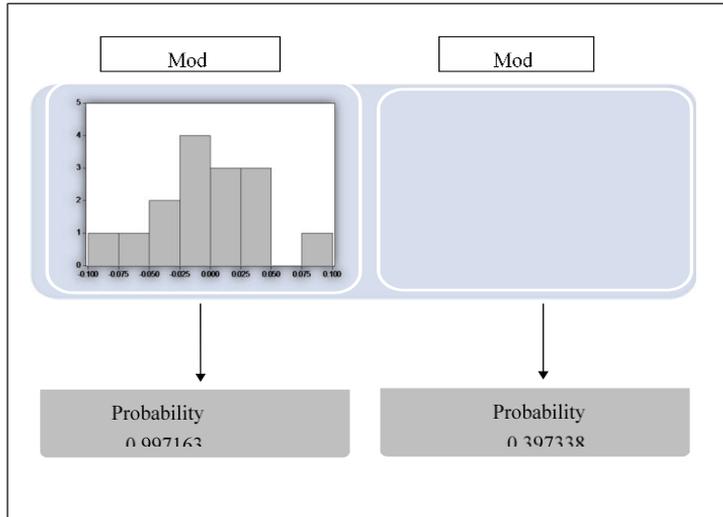
Hasil uji di atas, terlihat bahwa kedua model analisis berstasioner pada tingkat level, yang memiliki nilai Prob. di bawah 0,05 (< 0,05). Kedua analisis tesebut dapat disimpulkan bahwa data terkointegrasi atau dalam arti lain terdapat keseimbangan dalam jangka panjang.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam persamaan regresi yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Berra (uji J-B).



Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas

b. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antara variabel independen di dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas pada model, peneliti menggunakan metode parsial antar variabel independen. Rule of thumb dari metode ini adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka duga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka duga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Ajija at al, 2011). Berdasarkan pengujian dengan metode korelasi parsial antar variabel independen diperoleh bahwa tidak

terdapat masalah multikolinieritas dalam model. Hal itu dikarenakan nilai matrik korelasi (correlation matrix) tidak lebih dari 0,85.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Model 1</b>		
<b>Variabel</b>	<b>LogBBM</b>	<b>LogTDL</b>
LogBBM	1.000000	0.801969
LogTDL	0.801969	1.000000
<b>Model 2</b>		
<b>Variabel</b>	<b>LnBBM</b>	<b>TDL</b>
LnBBM	1.000000	0.186877
TDL	0.186877	1.000000

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan yaitu penaksir OLS yang bias, varian dari koefisien OLS akan salah. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilihat dari gambar 4.4 dan 4.5 sebagai berikut:

Model 1

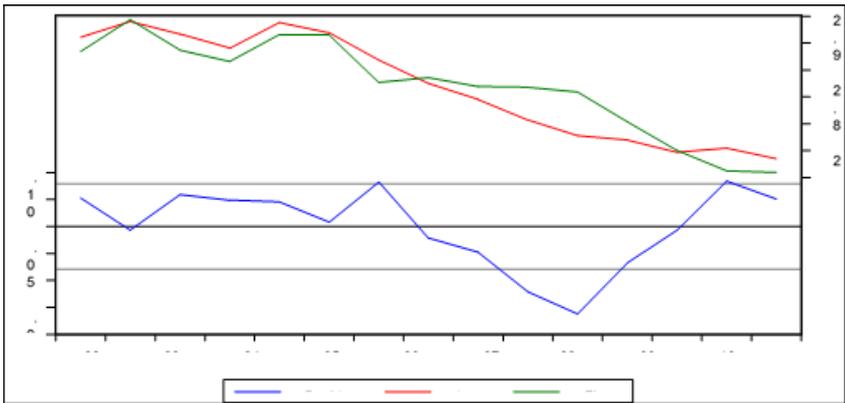


Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Gambar 4.4

Hasil Grafik Uji Heteroskedastisitas

Model 2



Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Gambar 4.5

Hasil Grafik Uji Heteroskedastisitas

Hasil grafik pada gambar 4.4 dan 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa kedua model tersebut tidak terjadi heterokedastisitas, karena residual tidak membentuk pola tertentu.

### 3. Error Correction Model

Pendekatan model Error Correction Model mulai timbul semenjak para ahli ekonometrika membahas secara khusus ekonometrika time series. Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan oleh Eangle-Granger. Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling utama bagi pekerjaan ekonometrika adalah didalam mengatasi masalah data *time series* yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung (Widarjono,2009). Winarno (2015) menyatakan pentingnya model ECM ini untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Adapun model Error Correction Model yang digunakan adalah sebagai berikut: Estimasi jangka panjang

**Tabel 4.8**  
**Hasil Estimasi Regresi dalam Jangka Panjang**

<b>Model 1</b>				
$Ineq_t = Q_0 + Q_1 \log BBM_t + Q_2 \log TDL_t + \epsilon_t$				
Dependent Variable: D(Ineq)				
Method: Least Squares				
Variabel	Coefficient	Prob.	R-squared	Prob(F-statistic)
C	-2,834465	0.0002	0.870018	0.000005
logBBM	0.166661	0.0004		
logTDL	-2.069040	0.5624		

<b>Model 2</b>			
$\text{LogPoverty}_t = Q_0 + Q_1 \ln \text{BBM}_t + Q_2 \text{TDL}_t + \epsilon_t$			
Dependent Variable: D(LogPoverty)			
Method: Least Squares			
Variabel	Coefficient	Prob.	R-squared
C	3.023498	0.7763	0.856856
lnBBM	-1.369051	0.0154	
TDL	-0.001248	0.0009	
		Prob(F-statistic)	
		0.000009	

Estimasi jangka pendek (ECM)

**Tabel 4.9**  
**Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Error Correction Model**

<b>Model 1</b>			
$D(\text{Ineq}_t) = w_0 + w_1 D \log \text{BBM}_t + w_2 D \log \text{TDL}_t + \text{ECT}(-1) + \epsilon_t$			
Dependent Variable: D(Ineq)			
Method: Least Squares			
Variabel	Coefficient	Prob.	R-squared
C	0.004888	0.7763	0.694648
D(logBBM)	0.132397	0.0075	
D(logTDL)	-0.025924	0.8944	
ECT (-1)	-0.491455	0.0456	
		Prob(F-statistic)	
		0.006202	
<b>Model 2</b>			
$D(\text{LogPoverty}_t) = w_0 + w_1 D \ln \text{BBM}_t + w_2 D(\text{TDL}_t) + \text{ECT}(-1) + \epsilon_t$			
Dependent Variable: D(LogPoverty)			

Method: Least Squares				
Variabel	Coefficient	Prob.	R-squared	Prob(F-statistic)
C	0.0860140	0.7763	0.928661	0.000005
D(lnBBM)	-1.460.583	0.0154		
D(TDL)	-0.001038	0.0009		
ECT (-1)	-0.667492	0.0167		

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Berdasarkan Tabel 4.7. hasil estimasi dengan menggunakan metode Error Correction Model sebagai berikut:

a. Model 1 :

$$\begin{aligned}
 D(\text{Ine}_t) &= 0.004888 + 0.132397D\log\text{BBM} - \\
 &0.025924D\log\text{TDL} \\
 &- 0.491455\text{ECT}(-1)
 \end{aligned}$$

b. Model 2

$$\begin{aligned}
 D\log\text{Poverty} &= 0.0860140 - 1460583D(\ln\text{BBM}_t) - \\
 &0.001038D(\text{TDL}_t) \\
 &- 0.667492\text{ECT}(-1)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada hasil estimasi dengan menggunakan metode Error Correction Model diperoleh nilai ECT (*Error Correction Term*) dengan tanda negatif dan signifikan pada  $\alpha=5\%$  maka model tersebut sah (*valid*) untuk digunakan. Karena model koreksi kesalahan dinyatakan valid apabila nilai ECT yang diperoleh signifikan dan bertanda negatif (Lesage, 2010).

Hasil estimasi ECM Model 1 di atas memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan Rumah Tangga. Dengan nilai  $R^2$  sebesar sekitar 0.694 atau 69,4% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang dimasukkan dalam model sudah cukup baik, sebab hanya 30,6% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di luar model. Sedangkan pada estimasi ECM model 2 dapat dilihat bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan nilai  $R^2$  sebesar sekitar 0.928 atau 92,8% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang dimasukkan dalam model sudah sangat baik, sebab hanya 7,2% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di luar model.

Hasil estimasi di atas menggambarkan bahwa dalam jangka pendek perubahan harga BBM mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesenjangan pendapatan dalam model 1 yang menghasilkan koefisien sebesar 0,132 yang artinya bahwa jika terjadinya kenaikan harga BBM 1 % dapat menaikkan kesenjangan pendapatan sebesar 13,2 %, sedangkan dalam jangka panjang diperoleh koefisien sebesar 0,166 yang artinya bahwa jika terjadinya kenaikan harga BBM 1 % dapat menaikkan kesenjangan pendapatan sebesar 16,6 %. Kemudian dalam jangka pendek perubahan tarif Dasar Listrik (TDL) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesenjangan pendapatan dalam model 1 yang menghasilkan koefisien sebesar 0,025 yang artinya bahwa jika terjadinya kenaikan TDL 1 % dapat menurunkan kesenjangan pendapatan sebesar 2,5 % namun tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang diperoleh koefisien sebesar 2,069 yang artinya bahwa jika terjadinya kenaikan TDL 1 % dapat menaikkan kesenjangan pendapatan sebesar 206,9 % namun tidak signifikan.

Hasil estimasi dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk model 2 perubahan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Akhirnya berdasarkan persamaan jangka pendek tersebut dengan menggunakan metode ECM menghasilkan koefisien ECT. Koefisien ini mengukur *respon regressand* setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2007) koefisien koreksi ketidakseimbangan ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai koefisien ECT sebesar 0.4914 mempunyai makna bahwa perbedaan antara kesenjangan pendapatan dengan nilai keseimbangannya sebesar 49,14 persen yang akan disesuaikan dalam waktu 4 bulanan.

#### 4. Uji Statistik

##### a. Uji T Statistik

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai Probability dengan nilai signifikan  $\alpha=5\%$ . Jika nilai prob.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai prob.  $< 0,05$  maka  $H_1$  diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji t Model 1**

Variabel	T-statistik	Probability	Keterangan
LogBBM	4.864052	0.0004	H1 diterima = ada pengaruh yang signifikan
LogTDL	0.595795	0.5624	H0 diterima = tidak ada pengaruh yang signifikan

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

**Tabel 4.11 Hasil Uji t Model 2**

Variabel	T-statistik	Probability	Keterangan
LnBBM	-3.654303	0.0033	H1 diterima = ada pengaruh yang signifikan
TDL	-6.829457	0.0000	H1 diterima = ada pengaruh yang signifikan

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Berdasarkan hasil uji t di atas dapat di simpulkan:

Pada model 1 yang menganalisis mengenai pengaruh harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga, terdapat nilai probabality 0,0004 untuk variabel harga BBM lebih kecil dari 0,05 ( $0,0004 < 0,05$ ), yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara harga BBM terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kemudian untuk variabel TDL terdapat nilai signifikan 0,5624 lebih besar dari 0,05 ( $0,5624 > 0,05$ ), yang berarti tinggi rendahnya Tarif Dasar Listrik tidak mempengaruhi kesenjangan pendapatan rumah tangga.

Pada model 2 yang menganalisis mengenai pengaruh harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap kemiskinan, terdapat nilai probabality 0,0033 untuk variabel harga BBM lebih kecil dari 0,05 ( $0,0033 < 0,05$ ), yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara harga BBM

terhadap kemiskinan. Kemudian untuk variabel TDL terdapat nilai signifikan 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap kemiskinan.

b. Uji F Statistik

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama sama. Dalam uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai f tabel dengan f hitung atau dengan perbandingan tingkat probabilitas f statistiknya pada  $\alpha = 5\%$ . Hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut

**Tabel 4.12 Hasil Uji F**

<b>Model 1</b>		<b>Signifikansi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>F-statistic</b>	<b>Prob (F-statistic)</b>	$\alpha = 5\%$	
40.16038	0.000005	0,05	Prob. < 0,05
<b>Model 2</b>			
35.91587	0.000009		

Sumber : Data penelitian diolah dengan program E Views 7

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedua model terdapat nilai prob. F-statistik lebih kecil dari signifikansi 0,05 ( $< 0,05$ ). hal ini terlihat bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama sama antara variabel bebas (harga BBM dan TDL) terhadap variabel terikat (Kesenjangan pendapatan dan Kemiskinan).

c. Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinasi merupakan suatu bilangan yang dapat menjelaskan sejauh mana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai  $R^2$  0.694648 hal ini

menunjukkan bahwa 69,4648 persen atau 69 % perubahan variabel kesenjangan pendapatan mampu dijelaskan oleh perubahan harga BBM dan TDL dan sisanya 31 % dijelaskan oleh variabel - variabel lain diluar model. Sedangkan untuk menjelaskan variabel kemiskinan diperoleh nilai  $R^2$  0.928661 hal ini menunjukkan bahwa 92,8661 persen atau 92 % perubahan variabel kemiskinan mampu dijelaskan oleh perubahan harga BBM dan TDL.

## BAB V

### KESENJANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA, KEMISKINAN DAN KAJIANYA

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan model Error Correction Model, diperoleh nilai koefisien Error Correction Term yang signifikan dan negatif sehingga model ini dapat digunakan dan model ini juga telah memenuhi uji asumsi klasik dan juga statistik sehingga model tersebut bersifat BLUE. Beberapa uji yang

digunakan sebagai syarat dari ECM seperti uji akar unit, uji derajat integrasi, dan uji kointegrasi telah terpenuhi. Hasil uji kointegrasi dapat diartikan bahwa variabel harga BBM dan TDL memiliki indikasi hubungan jangka panjang terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga dan kemiskinan, koefisien ECT dalam model ECM sebesar 0,491455 atau 49,14 % pada model 1 menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk memperoleh nilai keseimbangan adalah dalam waktu 4 bulan. Kemudian nilai koefisien ECT pada model 2 sebesar 0,667492 atau 66,74 menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan untuk memperoleh nilai keseimbangan adalah dalam waktu 6 bulan.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai  $R^2$  0.694648 hal ini menunjukkan bahwa 69,4648 persen atau 69 % perubahan variabel kesenjangan pendapatan mampu dijelaskan oleh perubahan harga BBM dan TDL dan sisanya 31% dijelaskan oleh variabel - variabel lain diluar model. Sedangkan untuk menjelaskan variabel kemiskinan diperoleh nilai  $R^2$  0.928661 hal ini menunjukkan bahwa 92,8661 persen atau 92 % perubahan variabel kemiskinan mampu dijelaskan oleh perubahan harga BBM dan TDL. Kemudian interpretasi dari hasil estimasi regresi sebagai berikut:

#### **A. Pengaruh harga BBM dan TDL terhadap Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga.**

Berdasarkan hasil regresi dengan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) diperoleh pengaruh antara harga BBM

terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah positif dan signifikan. Oleh karena itu jika harga BBM naik maka akan meningkatkan kesenjangan pendapatan rumah tangga. Dari hasil tersebut juga menggambarkan bahwa peningkatan harga BBM dan TDL sekitar 1 % dapat meningkatkan 15,79 % peningkatan kesenjangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ikhsan (2001) menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan harga minyak sebesar 10 % akan menyebabkan bertambahnya kesenjangan pendapatan dan penduduk miskin. Karena rumah tangga dengan pendapatan rendah menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk energi daripada rumah tangga berpendapatan tinggi (Zhang & Baranzini, 2004). Maka, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kesenjangan pendapatan rumah tangga. Pratama (2014) menyatakan rencana peningkatan harga BBM akan menciptakan-expected inflation yaitu tingkat inflasi yang terjadi sebelum harga BBM tersebut dinaikan, hal ini sesuai dengan teori inflasi, yaitu masyarakat akan menurun daya beli dan tingkat kesejahteraannya dikarenakan kenaikan harga barang secara umum dengan asumsi tingkat pendapatannya tetap.

Pengaruh antara TDL terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel TDL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan hubungan antara TDL terhadap kesenjangan pendapatan adalah positif. Jadi, naik turunnya TDL tidak mempengaruhi kesenjangan pendapatan rumah tangga dikarenakan kenaikan tarif hanya berlaku pada sambungan listrik 1350 VA keatas, sedangkan pada sambungan listrik 450 VA dan 900 VA tetap memperoleh subsidi. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengalokasikan subsidi listrik ke subsidi dalam bentuk lain seperti bantuan langsung tunai serta bantuan kesehatan (BPJS).

Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin yang masih menggunakan sambungan listrik 450 VA dan 900 VA.

**Tabel 4.13**  
**Penerimaan Subsidi Listrik yang Terdaftar di PLN**

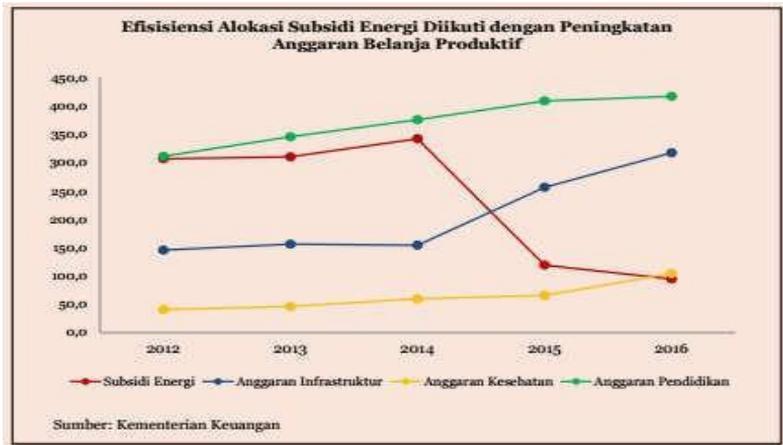
<b>Daya</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
450 VA	23 Juta
900 VA	23 Juta
<b>Total</b>	<b>46 Juta</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk miskin yang terbantu akibat tidak dicabutnya subsidi listrik untuk sambungan listrik 450 VA dan 900 VA. Dari sisi jumlah, secara total jumlah penduduk miskin yang masih menikmati subsidi listrik sebesar 18,7 juta atau 70,5 % dari seluruh penduduk miskin yang ada. Ditambah lagi penduduk miskin yang tidak divabut subsidi listriknya memperoleh konversi bantuan dari sektor pendidikan dan kesehatan yang dialihkan dari dicabutnya subsidi BBM dan subsidi listrik diatas 1350KWA.

## **B. Pengaruh harga BBM dan TDL terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi dengan pendekatan Error Correction Model hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara harga BBM terhadap kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, begitu juga dengan TDL terhadap kemiskinan. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa naiknya harga BBM dapat mengurangi angka kemiskinan, hal ini dikarenakan adanya kontraksi kebijakan fiskal untuk mengurangi subsidi BBM, dengan naiknya harga BBM pemerintah dapat mencabut atau mengurangi subsidi BBM jenis premium, mengingat akan bertambahnya angka kemiskinan dari pengurangan subsidi, pemerintah berupaya mengalihkan dana subsidi BBM seperti pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan agar tidak menambah penderitaan rakyat

miskin, pengalihan alokasi subsidi energi ini dilakukan melalui penataan ulang kebijakan subsidi supaya semakin adil dan tepat sasaran (RAPBN,2017). Selanjutnya, terkait dengan perkembangan efisiensi alokasi subsidi energi dengan peningkatan anggaran belanja produktif dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 4.6**  
Efisiensi Alokasi Subsidi Energi diikuti dengan Peningkatan Anggaran Belanja Produktif

**Tabel 4.14**  
Tabel Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2012 - 2016 (triliun rupiah)

Tahun	Kesehatan	Presentese	Pendidikan	Presentese
2012	15,2	2,4 % (Meningkat)	105,2	9,8% (Meningkat)
2013	17,6	-6,7 % (Menurun)	115,0	7,7% (Meningkat)
2014	10,9	12,3% (Meningkat)	122,7	20,9% (Meningkat)
2015	23,2	42,9% (Meningkat)	143,6	-0,3% (Menurun)
2016	66,1	-	143,3	-

Sumber: LKPP

Dari tabel di atas, terdapat beberapa perubahan jumlah anggaran menurut fungsi yang signifikan antara anggaran sebelum tahun 2016 dengan tahun 2016, yaitu fungsi kesehatan. Oleh karena itu dengan naiknya harga BBM dan TDL yang menyebabkan turunnya subsidi tidak akan menambahkan penderitaan rakyat miskin karena alokasi subsidi tersebut difokuskan untuk mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan kemiskinan. Jika dilihat dari tahun 2012-2016 peningkatan belanja pemerintah dalam kesehatan mempunyai tren yang meningkat pada tahun 2014 kesehatan mencapai 10,9 triliun meningkat sebesar 12,3 % ditahun 2015 sebesar 23,2 triliun. Namun, dalam realitanya kenaikan TDL juga belum dapat mempengaruhi orang miskin dikarenakan sekitar 1.955 rumah tangga miskin peserta program keluarga Harapan yang tersebar di Ciamis belum mendapatkan aliran listrik sendiri (Nurhandoko, 2015). Masih banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan subsidi juga menjadi masalah yang serius dari total sekitar 46 Juta penerima subsidi hanya 23,15 Juta pelanggan yang tergolong orang miskin dan tidak mampu selebihnya dinikmati oleh masyarakat mampu (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2017). Disisi lain, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 88,3%, artinya masih ada 11,7% atau 29 Juta jiwa penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik (Agustinus, 2017).

**Tabel 4.15**  
**Data Pengguna Listrik PLN dalam Data Terbaru Penanganan**  
**Fakir Miskin**

<b>Daya</b>	<b>Jiwa</b>
450 VA	14,70 Juta
900 VA	4,05 Juta
<b>Total</b>	<b>18,75 Juta</b>

Sumber, TNP2K, 2017

Dalam tabel tersebut bahwa terlihat kondisi subsidi sudah mulai di revisi kembali agar tepat sasaran, masih banyaknya kelompok kaya yang masih menerima subsidi dan lebih besar dibandingkan dengan yang berhak menerima subsidi.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Dari hasil analisis *Error Correction Model* (ECM) pada hasil estimasi dengan menggunakan metode Error Correction Model diperoleh nilai ECT (Error Correction Term) dengan tanda negatif dan signifikan pada  $\alpha = 5\%$  maka model tersebut sah (valid) untuk digunakan. Karena model koreksi kesalahan dinyatakan valid apabila nilai ECT yang diperoleh signifikan dan bertanda negatif, pada model 1 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar sekitar 0.694 atau 69,4% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang dimasukkan dalam model sudah cukup baik, sebab hanya 30,6% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di luar model dan dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan Rumah Tangga.

Pada estimasi ECM model 2 dapat dilihat bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan nilai  $R^2$  sebesar sekitar 0.928 atau 92,8% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang dimasukkan dalam model sudah sangat baik, sebab hanya 7,2% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas di luar model.

Uji statistik dalam model 1 diperoleh ada pengaruh yang signifikan antara harga BBM terhadap kesenjangan pendapatan rumah tangga dan tinggi rendahnya Tarif Dasar Listrik tidak mempengaruhi kesenjangan pendapatan rumah tangga, uji ini diperoleh dari uji t. Kemudian dari hasil uji secara simultan diperoleh ada pengaruh signifikan secara bersama sama antara variabel bebas (harga BBM dan TDL) terhadap variabel terikat (Kesenjangan pendapatan).

Uji statistik dalam model 2 diperoleh ada pengaruh yang signifikan antara harga BBM terhadap kemiskinan dan terdapat

pengaruh yang signifikan antara Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap kemiskinan, yang diperoleh dalam uji t. Kemudian dari hasil uji secara simultan diperoleh ada pengaruh signifikan secara bersama sama antara variabel bebas (harga BBM dan TDL) terhadap variabel terikat (Kemiskinan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Tushar, 2014. Educational inequality in rural and urban India. *International Journal of Educational Development* 34 11-19. Elsevier
- Agustinus.2017. mulai tahun ini subsidi listrik tepat sasaran untuk warga miskin. [www.m.detik.com](http://www.m.detik.com)
- Ajija, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Alkire S. and Foster James, 2010. *Designing the Inequality-Adjusted Human Development Index (HDI)*. WORKING PAPER NO. 37. ISSN 2040-8188. OPHI
- Amartya Sen (1999) "*The ends and means of development*" Chapter 2 from "*Development as Freedom*", Oxford University Press.
- Angelsen, A and Sven Wunder. (2006). *Poverty and inequality: Economic growth is better than its reputation*. <https://pdfs.semanticscholar.org>
- Annim, S.K., S. Mariwah and J. Sebu. 2012. Spatial Inequality and Household Poverty in Ghana. *Economic Systems* 36. pp. 487-505
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat* . Yogyakarta : STIE YKPN
- Atkinto, Anthony. 1970. *On the Measurement of Inequality*. *Journal of Economic Theory* 2, 244-263
- Badan Pusat Statistik. 2010, *Sensus Penduduk tahun 2010*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. 2015. *Human Development Index 2014*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. 2016. *Bahan Sosialisasi IPM Metode Baru*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. 2016. *Human Development Index 2015*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat: Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : BPS
- \_\_\_\_\_. 2017. *Human Development Index 2016*. Jakarta : BPS Sumatera Utara. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2015*. Jakarta
- Basuki, Agus Tri. 2014. *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*. Buku 1. Yogyakarta : Katalok Dalam Terbitan (KDT)

- Bigsten, A. 1987. Poverty, Inequality and Development, in Gemell, N (eds). *Surveys in Development Economics*. Oxford: Basil Blackwell
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- BPHMIGAS, 2010. Dampak Kenaikan BBM <http://www.bphmigas.go.id/artikel-migas/dampak-kenaikan-bbm>
- Chiappero-Martinetti, E. 2009. "Poverty as lack of opportunity: a comparison between John Roemer and Amartya Sen." *Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica LXIII* (1-2): 71-90.
- Climent, Amparo Castello and Rafael Domenech. 2008. *Human Capital Inequality, Life Expectancy And Economic Growth*. The *Economic Journal*, 118(4) 653- 677: Blackwell Publishing. Oxford
- Damuri, R. YO., & Perdana, A. A. (2003). The Impact of Fiscal Policy on Income distribution and Poverty: A Computable General Equilibrium Approach for Indonesia. *Economic Working Paper Series*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Domowitz, I and L. Elbadawi. 1987. An Error Correction Approach to Money Demand: The Case of the Sudan. *Journal of Development Economics*, Vol. 26, pp. 27-175
- Dorling, Danny dkk. 2006. *Global inequality of life expectancy due to AIDS*. Analysis and comment. *BJM* Volume: 332.
- Dre` ze, J., Sen, A., 2002. *India: Development and Participation*. Oxford University Press, New Delhi.
- Dziedzic, N. (2006). *WORLD POVERTY*. United States of America: Information Plus, Wylie, Texas.
- Easterly, W. 2007. Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument. *Journal of Development Economics*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.11.002>
- Farid, Nila Moeloek. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*

Tahun

2015-2019.

[www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-](http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-)

2015

Gujarati, N, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. Mc. Graw-Hill, Singapore.

\_\_\_\_\_. 2004. *Basic Econometrics. Fourth edition*. The McGraw-Hill Companies. Singapore

\_\_\_\_\_. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Buku 1. Edisi 5. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

\_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Buku 2. Edisi 5. Penerbit Salemba: Jakarta

Human Development Report. 2016. *Human Development for Everyone Briefing note for countries on the 2016 Human Development Report*. UNDP

Indonesia-Investments. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301?> (di akses 12 Februari 2018)

Jedrzejczak, A. (2008). Decomposition of the Gini Index by Sources of Income. *International Advance Economics Research*, Vol. 14, pp.441-447.

Khoiriyah Nurul, 2013. Preferensi Konsumsi Masyarakat Terhadap Energi Terbarukan (Biofuel) (Studi Kasus Pada Komplek Perumahan Tambak Rejo Indah, Waru, Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.

Klugman, J, Rodriguez, F & Choi, HJ. 2011. *The HDI 2010: New controversies, old critiques*, *Journal of Economic Inequality*, 9 (2), pp. 249-288

Kuncoro, Mudrajad. 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

\_\_\_\_\_. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan ?*. Jakarta: Salemba Empat

Kondo, N., G. Sembajwe, I. Kawachi, R. van Dam, S. Subramanian and Z. Yamagata. 2009. "Income Inequality, Mortality and Self-rated Health: Meta-analysis of Multilevel Studies."

- British Medical Journal 339: 447.
- Mahulauw, Abdul Kadir, dkk. 2016. Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.02. Brawijaya
- Maipita, 12 Januari 2017. Kebijakan Pemerintah Untuk Siapa?. Waspada.
- \_\_\_\_\_, and Setyo T. Wahyudi, 2017. Income Distribution and Inequality in Indonesia: Study on Middle Class Household. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18 (1), 131-141
- \_\_\_\_\_, M. Dan Jantan and Nor Azam A.R, 2010. The Impact Of Fiscal Policy Toward Economic Performance And Poverty Rate In Indonesia. Bulletin of Monetary, Economics and Banking. Vol 12, No 4.
- \_\_\_\_\_, 2011. The Impact of Diverting Fuel Subsidy to Agricultural Sector on Income Distribution and Poverty. papers.ssrn.com
- Norheim, O. J., and Y. Asada. 2009. "The ideal of equal health revisited: definitions and measures of inequity in health should be better integrated with theories of distributed justice." International Journal for Equity in Health 8(40).
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurhandoko, 2015. Rumah tangga miskin belum nikmati listrik. [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)
- Oshima, Harry T. 1976. Distribusi Pendapatan. Prisma No. 1, Februari 1976. Hal.3- 12.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia, 4(2), 210-223.
- Preston, Samuel, et.all, 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- \_\_\_\_\_, Heuveline P, Guillot M. 2001. *Demography: measuring and modelling population processes*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Rahman Qorida Rosyita, 2015. Analisis Terjadinya Inflasi Dari Sisi

- Supply (Cost- Push Inflation) Di Indonesia Tahun 1984-2013. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. *Economic Growth and Human Development in Latin America* Cepal No 78 The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Diakses dari: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf> 12/11/2007 4:57 PM
- Rinaldi. 2017. *Education Is As The Encouragement Of The Increasing Of Human Development Index In Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/318654424>
- Rodriguez-Pose, A. and D. Hardy. 2015. Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global. *Applied Geography* pp. 1-13
- Samman, E., G. Ranis and F. Stewart. 2011. *Inequality in multiple dimensions of Human Development*. Queen Elizabeth House, Oxford.
- Subramanian, S.V., and I. Kawachi. 2004. "Income Inequality and Health: What Have We Learned So Far?" *Epidemiologic Reviews* 26: 78-91.
- Sunderam, K and Suresh D Tendulkar (2003): 'Poverty Has Declined in the 1990s', *Economic and Political Weekly*, XXXVIII(4): 327-37.
- Suyana Utama, 2009. "Hubungan Anatara PDRB Perkapita, Struktur Ekonomi, dan Belanja Publik Perkapita Dengan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali" (Laporan Penelitian) Denpasar Universitas Udayana.
- Sen, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Development as Freedom*. Knopf, New York.
- Thomas, V., Wang, Y., Fan, X., 2001. *Measuring education inequality: Gini coefficients of education*. In: *Policy Research Working Paper Series* 2525. The World Bank
- Tilak, J.B.G., 2008. *Higher education: a public good or a commodity for trade? Commitment to higher education or commitment of higher*

- education to trade. Prospects* 38 (4) 449-466.
- TNP2K. 2017. Kesiapan Data dalam Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Jakarta.
- Todaro, M., & Smith, S. 2000. *Economic development* (7th ed.). Boston: Addison Wesley.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Economic development* (10th ed.). Boston: Addison Wesley.
- Torras Moriano., and James K. Boyce, 1998. Analysis Income, inequality, and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets Curve. *Ecological Economics* 25 147-160. Elsevier
- UNDP in Indonesia. 2017. *Indonesia's Human Development Index Rises but Inequality Remains*. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/>.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press
- \_\_\_\_\_. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press
- \_\_\_\_\_. 1997. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press
- \_\_\_\_\_. 2016. *Human Development Report 2016*. New York: Oxford University Press
- Widarjono, Agus. 2016. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Winarno, Wahyu Wing. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Zhang, Z., & Baranzini, A. (2004). What do we know about carbon taxes ? An inquiry into their impacts on competitiveness and distribution of income, 32, 507-518. [https://doi.org/10.1016/S0301-4215\(03\)00152-6](https://doi.org/10.1016/S0301-4215(03)00152-6)

*Kesenjangan*

PENDAPATAN RUMAH TANGGA  
DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

